

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bangsa Indonesia terkenal dengan sebutan Negeri Tembakau, karena merupakan salah satu negara dengan penghasil tembakau terbaik di dunia. Dengan Tersebar nya lahan persawahan dan perkebunan, bangsa indonesia dapat menghasilkan tanaman yang beraneka ragam, seharusnya dengan keanekaragaman hasil pertanian yang ada di indonesia dapat mendorong pemerintah untuk memprioritaskan pembangunan pertanian, pembangunan pertanian yang tepat dan dikelola dinas terkait dengan baik akan membawa dampak positif bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penanganan yang tepat terhadap sektor pertanian dapat menyerap tenaga kerja di daerah tersebut. Hal itu dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, karena di negara indonesia angka kemiskinan dan pengangguran masih sangat tinggi dibandingkan dengan negara maju. Sektor pertanian, misalnya tanaman tembakau, karena tanaman tembakau bisa tumbuh di semua dataran ketinggian, mulai dari dataran rendah sampai daerah pegunungan. Tanaman tembakau memang sangat cocok bila dikembangkan di negara indonesia, karena diketahui bahwa indonesia mempunyai suhu dan alam yang cocok untuk tanaman tembakau.

Tembakau adalah produk pertanian yang diproses dari daun tanaman jenis *Nicotiana*. Tembakau sendiri sebenarnya menyimpan banyak sekali manfaat bagi tubuh, namun sering kali menganggap bahwa tanaman tembakau itu hanya

menimbulkan kerugian bagi kesehatan. Manfaat dari daun tembakau, yaitu sebagai berikut :

1. Tembakau menghasilkan protein anti kanker
2. Melepaskan gigitan lintah
3. Obat diabetes dan antibodi
4. Obat anti radang
5. Obat HIV/AIDS

Negara indonesia yang mengantungkan perekonomiannya dari pertanian tembakau. Tanaman tembakau dan produk olahannya merupakan salah satu komoditas perdagangan dan industri terpenting di indonesia, komoditas ini juga menjadi sumber penghidupan utama jutaan rakyat indonesia, kedudukan atau peran strategis tanaman tembakau diakui resmi oleh pemerintah indonesia. Dalam penjelasan pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan, yang isinya disebutkan bahwa:

“Komoditas strategis perkebunan adalah komoditas perkebunan yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan, antara lain kelapa sawit, karet, kakao, kopi, tebu, dan tembakau.”

Indonesia menjadi negara keenam penghasil tembakau terbesar dunia dengan jumlah rata-rata produksi tembakau sebesar 164.851 ton/tahun. Hasil panen tembakau di Indonesia mampu menyumbang 2,67% daun tembakau dari pasokan global. Alasan utama menempatkan tembakau sebagai komoditi strategis adalah fakta bahwa komoditi ini masih menjadi salah satu sumber pendapatan

terbesar bagi keuangan negara. Tembakau masih sangat menjanjikan keuntungan yang besar dari sektor pertanian, industri, perdagangan, serta keuangan.

Industri tembakau Indonesia justru mendapat perlakuan diskriminatif dari pemerintah. Hal ini dapat terjadi karena upaya pemerintah untuk mengadopsi prinsip-prinsip dalam *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC) ke dalam hukum nasional lebih kuat daripada upaya perlindungan pertanian tembakau. Adopsi ini dilakukan misalnya dengan kebijakan pengalihan tanaman, pengurangan subsidi pertanian tembakau.

Kebijakan kenaikan cukai yang menyebabkan industri tembakau nasional yang berskala kecil bangkrut. Keadaan inilah yang menyebabkan dinamika persaingan dalam industri juga semakin ketat baik antarperusahaan, kaum kepentingan, maupun antarnegara. Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI) mendesak pemerintah membatasi impor tembakau. Impor tembakau dinilai sangat menguntungkan pihak luar, sementara petani tembakau semakin menjerit. Agus (2013) menyatakan bahwa petani lebih berminat untuk menanam tembakau, karena harga jual tembakau tinggi. Desakan ini sebagai hasil dari rapat kerja nasional, yang diharapkan bisa berpihak kepada kepentingan petani tembakau di Indonesia bukan berpihak pada kepentingan lain.

Pentingnya peranan pemerintah dan negara dalam melindungi industri nasional bukan hanya dikarenakan ekonomi tembakau memiliki kontribusi yang besar terhadap pendapatan negara, melainkan juga dikarenakan industri ini juga memberikan sumbangan langsung terhadap pendapatan nasional, penyerapan tenaga kerja, dan *multiplier effect* yang luas terhadap perekonomian di Indonesia,

terutama untuk kepentingan petani tembakau itu sendiri. Pertanian di Indonesia di era globalisasi harus dipandang sebagai sektor ekonomi yang simetris dengan sektor yang lainnya. Sektor ini tidak boleh lagi hanya berperan sebagai aktor pendukung bagi pembangunan nasional seperti selama ini diberlakukan, tetapi harus menjadi pemeran utama yang sejajar dengan sektor industri. Sektor pertanian harus menjadi sektor yang modern, efisien, dan berdaya saing, dan tidak boleh hanya dipandang sebagai pengaman untuk menampung tenaga kerja tidak terdidik yang melimpah ataupun penyedia pangan yang murah agar sektor industri mampu bersaing dengan hanya mengandalkan upah yang cenderung rendah.

Faktor lain mengapa Indonesia disebut sebagai negara tembakau adalah dari faktor iklim dan struktur tanah yang ada di Indonesia yang sangat mempengaruhi kualitas dari tanaman tembakau tersebut. Hal ini akan menyebabkan karakteristik dan rasa yang berbeda dari setiap daerah. Jenis-jenis dan nama tembakau akan disesuaikan dengan daerah asal, misalnya seperti Tembakau Temanggung, Lombok, Sumenep Madura, Garut, dan Kudus. Temanggung merupakan salah satu daerah yang sangat cocok untuk tanaman tembakau. Tembakau Temanggung juga dikenal sangat berkualitas dibandingkan tembakau di daerah lain. Tembakau di kabupaten Temanggung merupakan salah satu komoditas terpenting dalam menunjang berjalannya perekonomian yang ada di Kabupaten Temanggung. Tembakau yang terkenal dari Kabupaten Temanggung adalah tembakau srintil, tembakau nomor satu dihasilkan oleh kota kecil yang terletak di lereng Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro, Karena menurut mereka tembakau srintil mempunyai aroma, rasa dan tekstur yang berbeda dari tembakau

jenis lain. Tingginya harga tembakau srintil mempengaruhi harga pasaran di daerah lainnya, harga persatu kilonya bisa mencapai Rp.800.000 dan bahkan bisa mencapai harga Rp.1.000.000/kg jika permintaan tinggi. Tembakau srintil mempunyai aroma yang lebih kuat, namun aroma tersebut banyak dicari sehingga membuat tembakau srintil berharga tinggi. Tembakau paling mahal di Temanggung ini mempunyai aroma khas, harum mirip aroma buah salak. Srintil kering berbeda dari tembakau-tembakau lain, warnanya hitam pekat seperti habis disiram madu. Agak lembab, tetapi tidak basah. Tembakau srintil dihasilkan dari daun paling atas pada tanaman tembakau. Biasanya dipetik paling akhir. Sewaktu masih di pohon, tak ada yang bisa mengetahui lembaran daun itu akan menjadi srintil. Petani baru mengetahui setelah memanen srintil, setelah daun tembakau yang dikeram seperti membusuk, mengeluarkan cairan yang menyebarkan aroma harum.

Mantan Bupati Temanggung, Drs.H Hasyim Afandi dalam seminar yang bertema kretek dalam Perspektif Ekonomi, Politik dan Budaya yang digelar oleh Organisasi gerakan Lokal Perkumpulan independen Komunitas Temanggung di Hotel Cemara Baru, Jakarta mengatakan bahwa:

”... Tembakau merupakan salah satu potensi unggulan daerah karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi masyarakat Kabupaten Temanggung yang harus tetap dijaga kelestariannya. Menurutnya, tembakau memiliki nilai – nilai ekonomi yang tinggi bagi masyarakatnya, sehingga pemerintahnya tidak akan bermaksud untuk mengurangi tanaman tembakau yang ada di kabupaten Temanggung. Masalah tembakau dan rokok semestinya harus dilihat secara jernih dan tidak langsung

dihubungkan dengan isu kesehatan semata. Kita juga harus memperhatikan masalah ekonomi pada daerah – daerah yang memiliki kemampuan menghasilkan tembakau...”.¹

ISI RUU pp 109 th 2012

Namun sekarang ini banyak hal yang menjadi polemik di antara para petani tembakau di Kabupaten Temanggung, tentang RUU tembakau yang menurut mereka RUU tersebut akan mematikan mata pencaharian jutaan petani tembakau dan cengkeh di Indonesia. Banyak terjadi dinamika kepentingan dan mendorong para petani di Indonesia untuk membentuk suatu kelompok kepentingan dan melakukan aksi-aksi demonstrasi yang melibatkan banyak kelompok kepentingan yang mempunyai tujuan untuk mempertahankan apa yang menjadi mata pencaharian mereka selama ini, mereka merasa terancam dengan adanya RUU tembakau karena hal tersebut bersebrangan atau tidak sesuai dengan kepentingan para petani di Kabupaten Temanggung, seperti demo yang terjadi pada tahun 2012 para pendemo yang tergabung dalam Koalisi Nasional Penyelamat Kretek dan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), berdemo di depan Kementerian Kesehatan, Kuningan, Jakarta Selatan. Mereka menyatakan ketidaksetujuannya akan adanya rancangan undang-undang, karena menurut mereka bila RUU tentang tembakau disahkan akan membunuh para petani, sebagai mana diketahui bahwa tembakau sudah menjadi sumber mata pencaharian mereka selama bertahun-tahun dan bila dengan adanya RUU tembakau yang

¹Pikatan.wordpress.com/2010/04/04/kebijakan-ekonomi-politik-tembakau-temanggung, di akses pada pukul: 18.30 10 November 2013

melarang mereka untuk menanam tanaman tembakau, dirasa tidak adil bagi para petani.

Penolakan RUU tembakau juga terjadi di Kab.Temanggung, yang sudah banyak orang mengetahui bahwa Kab.Temanggung menjadi penghasil tembakau terbaik di antara daerah lain. Penolakan tersebut dituangkan dalam surat pernyataan yang kemudian di kirimkan ke pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Tengah (Kompas.com).

Rancangan undang – undang pertembakauan yang kini sedang dibahas di Baleg masih belum banyak kemajuan. Sebagai anggota masih belum sepakat terhadap RUU ini dari mulai judul hingga substansi. Sebagian anggota Baleg meminta agar lebih banyak pihak yang dihadirkan. Ini bertujuan agar bisa mendapatkan gambaran yang lebih kaya. Menurut Hendrawan Supratikno dari FPDIP dan Poempida dari FPG mengatakan bahwa :

“... idealnya RUU meramu berbagai kepentingan dan tidak merugikan salah satu pihak, apalagi ditengarai ada kepentingan asing yang bermain disini ...”.

RUU tentang pengendalian dampak produk tembakau terhadap kesehatan merupakan salah satu RUU yang telah diprogramkan dalam program legislasi Nasional (prolegnas) tahun 2010-2014. DPR-RI bersama dengan pemerintah bahkan telah menyetujui RUU tersebut masuk dalam prolegnas RUU prioritas tahun 2011 berdasarkan keputusan DPR-RI Nomor 02B/DPR-RI/II/2010-2011 tentang program legislasi Nasional RUU prioritas tahun 2011. Isi dari RUU pertembakauan tersebut adalah sebagai berikut:

Disisi lain, ketua Komnas pengendalian tembakau Hakim Sorimuda Pohan meminta pembahasan RUU ini harus dihentikan. Hakim menuding RUU pertembakauan ini sudah disetir oleh kepentingan para pengusaha. Sebab RUU ini sarat dengan kepentingan dagang. Sementara itu Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Temanggung sebagai wadah kelompok petani di Kabupaten Temanggung diharapkan dapat berperan aktif terhadap apa yang terjadi di kalangan petani tembakau. Melalui pelaksanaan program-program tepat sasaran maka peningkatan kesejahteraan petani tembakau di Kabupaten Temanggung dan upaya mereka dalam memperjuangkan kepentingan para petani tembakau di Kabupaten Temanggung dapat diwujudkan. Program-program tepat sasaran juga akan bermanfaat bagi pemberdayaan dari Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Temanggung sendiri.

Pemberdayaan ini akan bermanfaat untuk meningkatkan kinerja dan kepekaan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Temanggung dalam menghadapi masalah-masalah yang menimpa petani tembakau di Kabupaten Temanggung. Pada lingkup nasional dapat dilihat dari peran Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Temanggung untuk melakukan kerjasama dan negosiasi dengan pihak-pihak nasional, agar dalam menentukan suatu kebijakan atau RUU pertembakauan harus melihat dinamika kepentingan semua pihak. Pihak-pihak ini dapat berupa Pemerintah Pusat dalam hal regulasi nasional, pabrik industry rokok dalam hal pemasaran tembakau, dan pihak-pihak lain yang berkaitan dalam usaha peningkatan kesejahteraan petani tembakau.

Beberapa kejanggalan di dalam RUU Tembakau ini adalah:

1. Pembahasan tidak focus kepada pertembakauan atau pun nasib petani, tetapi lebih kepada industry rokok. Lagi pula jika ingin focus kepada suatu produk, mengapa mesti tembakau yang menjadi penting? Bukankah ada beras, atau kopi, coklat, yang menjadi andalan produksi ndonesia di skala dunia?

Dan anehnya, walapun RUU ini berbicara soal tembakau, tetapi sama sekali tidak memperhatikan masalah impor tembakau yang kian naik dari tahun ketahun. Seharusnya jika ingin melindungi petani tembakau, pemerintah membatasi atau malah melarang impor tembakau. Total impor tembakau Indonesia selama tahun 2012 naik sebesar 13%, mencapai US\$ 382,43 juta atau setara dengan Rp 3,824 Trilyun. Sebagian besar impor tembakau ini berasal dari China, yaitu sebesar US\$191,4 juta atau setara denganRp 1,914 Trilyun.

2. RUU Tembakau bermaksud menjegal dampak kesehatan tembakau atau rokok yang sudah tertera didalam UU Kesehatan no. 36 tahun 2009 yang menyatakan bahwa tembakau adalah bahan adiktif. Dalam salah satu pasal RUU Tembakau terdapat pernyataan yang mengeliminir pasal ini di UU Kesehatan ini.

3. RUU Tembakau berarti juga mengeliminir upaya-upaya dalam pengendalian tembakau yang selama ini dilakukan.

Berdasarkan permasalahan yang disebutkan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan mengangkat judul **“PERAN ASOSIASI PETANI TEMBAKAU INDONESIA (APTI) DALAM MEMERJUANGKAN KEPENTINGAN PETANI TEMBAKAU DI KABUPATEN TEMANGGUNG “.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasar uraian diatas, maka identifikasi permasalahan atau focus masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dan cara perjuangan APTI Kabupaten Temanggung dalam merespon RUU pertembakauan ?
2. Bagaimana *efektivitas* perjuangan APTI Kabupaten Temanggung untuk melindungi kepentingan mereka terkait RUU Pertembakauan?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat perjuangan APTI Kabupaten Temanggung dalam memperjuangkan kepentingan mereka tersebut ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana bentuk dan cara yang dilakukan APTI dalam merespon RUU Tembakau di Kab. Temanggung.
2. Mengetahui bagaimana *efektivitas* perjuangan APTI di Kab. Temanggung untuk melindungi kepentingan mereka.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a) Memperkaya khasanah studi mengenai usaha kelompok kepentingan khususnya APTI dalam memperjuangkan kepentingan petani tembakau.
- b) Memberikan literatur baru terkait kelompok kepentingan, dalam hal ini efektifitas perjuangan APTI dalam memperjuangkan kepentingan petani tembakau.
- c) Penelitian ini juga diharapkan memperlihatkan elaborasi teori yang saling mendukung untuk mengetahui bagaimana cara APTI memperjuangkan hak

para petani tembakau yang dianalisis melalui konsep kelompok kepentingan dan kebijakan publik yang dipadupadankan menjadi satu kesatuan konsep untuk mendukung analisis permasalahan .

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi segenap pemangku kepentingan yang berperan upaya APTI dalam memeperjuangkan para petani tembakau Kab. Temanggung.

1.5. Landasan Teori

1.5.1. Kelompok Kepentingan (*interest group*)

Menurut Ramlan Surbakti (1999), kelompok kepentingan (*interest group*) ialah sejumlah orang yang memiliki kesamaan sifat, sikap, kepercayaan dan/atau tujuan, yang sepakat mengorganisasikan diri untuk melindungi dan mencapai tujuan. Sebagai kelompok yang terorganisasi, selain keanggotaannya jelas, kelompok ini juga memiliki pola kepemimpinan, sumber keuangan untuk membiayai kegiatan, dan pola komunikasi baik ke dalam maupun keluar organisasi.²

Setiap individu atau kelompok memiliki kepentingan yang harus diraih dan dipertahankan bagi kelangsungan hidupnya. Upaya memperjuangkan kepentingan tersebut membutuhkan dukungan dari banyak pihak untuk memperjelas tujuan dari adanya upaya tersebut. Bentuk kekuatan yang mempunyai daya dukung adalah kekuatan yang di dalamnya terdapat dua orang

²Ramlan Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Grasindo, hlm. 109

atau lebih yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Bentuk inilah yang disebut dengan kelompok kepentingan (*interest group*).

Kelompok kepentingan juga dapat diartikan sebagai sarana untuk menyampaikan atau memperkuat penyampaian tuntutan kepentingan anggota masyarakat terhadap sistem politik.³ Selain itu kelompok kepentingan juga dapat didefinisikan sebagai setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah tanpa, pada waktu yang sama, bekehendak memperoleh jabatan publik.⁴

Dari definisi-definisi di atas, ada enam substansi pemahaman konsep kelompok kepentingan yang dapat diambil: (Fathurahman dan Sobri, 2002)⁵

1. Setiap kelompok kepentingan merupakan sekumpulan orang yang mengorganisasikan dirinya atas nama satu orang atau lebih kepentingan tertentu yang diperjuangkan.
2. Adanya kepentingan yang sama, menyatukan sekelompok orang untuk bergabung membentuk satu organisasi dengan nama tertentu.
3. Setiap aktivitas kelompok kepentingan selalu bergandengan dengan isu publik yang ditujukan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.
4. Setiap aktivitas yang dilakukan kelompok kepentingan, akan mengatasnamakan masyarakat, mengingat fungsinya sebagai artikulator (mengartikulasi) atau pemilah-pemilah kepentingan-

³Mohtar Mas'ood dan Colin MacAndrews, 2001, *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 52

⁴ *Ibid.*, hlm. 53

⁵Budi Suryadi, 2006, *Kerangka Analisis Sistem Politik Indonesia*, Yogyakarta: IRCiSoD, hlm. 47-48

kepentingan dalam masyarakat, dan mengubahnya menjadi tuntutan yang akan ditujukan kepada pemerintah.

5. Aktivitas kelompok kepentingan tidak ditujukan untuk memperoleh jabatan publik, tetapi lebih pada upaya partisipasi politik atau berusaha mempengaruhi kebijakan yang diambil pemerintah.
6. Adanya berbagai variasi atau tipe kelompok kepentingan artinya tidak memiliki bentuk tunggal, tergantung dari perbedaan karakteristik keorganisasian dari kelompok kepentingan.

1.5.3.2. Jenis-jenis Kelompok Kepentingan

Kelompok kepentingan dapat diklasifikasikan menjadi berbagai tipe disesuaikan dengan banyak hal seperti struktur kelompok, gaya kelompok, basis dukungan, dll. Hal ini juga akan dapat mempengaruhi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial negara tersebut. Apabila dikelompokkan, kelompok kepentingan dapat dibagi menjadi:⁶

1. Kelompok Anomik

Kelompok ini terbentuk di antara unsur-unsur masyarakat secara spontan dan hanya seketika. Karena tidak memiliki nilai-nilai dan norma yang mengatur, kelompok ini sering bertumpang tindih (*overlap*) dengan bentuk partisipasi politik yang non konvensional seperti demonstrasi, kerusuhan tindak kekerasan politik, dsb.

⁶ Mas'ood, op.cit., hlm. 54-56

1. Kelompok Non-Assosiasional

Kelompok ini mungkin berujud kelompok-kelompok keluarga dan keturunan atau etnik, regional, status, dan kelas yang menyatakan kepentingan secara kadang kala melalui individu-individu, klik-klik, kepala keluarga atau pemimpin agama, dan semacam itu. Secara teoritis, kegiatan kelompok ini merupakan ciri masyarakat belum maju, di mana kesetiaan kesukuan atau keluarga-keluarga aristokrat mendominasi kehidupan politik, dan di mana kelompok kepentingan yang terorganisir dan mengkhusus tidak ada atau masih lemah.

2. Kelompok Institusional

Organisasi-organisasi seperti partai politik, korporasi bisnis, badan legislatif, militer, birokrasi, dan gereja seringkali mendukung kelompok kepentingan institusional atau memiliki anggota-anggota yang khusus bertanggungjawab melakukan kegiatan *lobbying*. Kelompok ini bersifat formal dan memiliki fungsi-fungsi politik atau sosial lain di samping artikulasi kepentingan. Baik sebagai badan hukum maupun sebagai kelompok-kelompok lebih kecil dalam badan hukum itu (seperti fraksi-fraksi badan legislatif, klik-klik perwira, departemen, dan klik-klik ideologis dalam birokrasi), kelompok ini bisa menyatakan kepentingannya sendiri maupun mewakili kepentingan dari kelompok-kelompok lain dalam masyarakat.

3. Kelompok Asosiasi

Kelompok ini meliputi serikat buruh, kamar dagang atau perkumpulan usahawan dan industrialis, paguyuban etnik, persatuan-persatuan yang diorganisir oleh kelompok-kelompok agama, dsb. Yang paling khas adalah kelompok ini menyatakan kepentingan dari suatu kelompok khusus, memakai tenaga staff profesional yang bekerja penuh, dan memiliki prosedur teratur untuk merumuskan kepentingan dan tuntutan. Taktik dan tujuannya sering diakui sah dalam masyarakat, dan dengan mewakili kelompok dan kepentingan yang luas, kelompok ini dengan efektif dapat membatasi pengaruh kelompok anomic, non-asosiasi, dan institusional.

1.5.3.3. Peran Kelompok Kepentingan

Kelompok kepentingan dalam ilmu politik bisa diartikan sebagai setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah, dan pada waktu yang sama berkehendak memperoleh jabatan publik (Collin Andrew).

Kelompok kepentingan mengumpulkan dan mengubah kepentingan-kepentingan yang tercerai berai di masyarakat menjadi satu kesatuan untuk kemudian di perjuangkan, agar menjadi bagian dari kebijakan publik yang memberi manfaat bagi kelompoknya, dan kepentingan masyarakat yang di perjuangkan.

Ada banyak hal yang dilakukan oleh kelompok kepentingan untuk mendapatkan pengaruh terhadap kebijakan pemerintah yaitu:

- Demokrasi dan tindakan kekerasan. Hal ini mejadi sarana untuk menyatukan tuntutan yang bisa di pakai oleh setiap kelompok kepentingan.
- Hubungan pribadi. Dengan menggunakan keluarga, sekolah, hubungan kedaerahan menjadi perantara
- Perwakilan langsung. Melakukan representasi atau komunikasi langsung dengan orang yang berkepentingan
- Saluran formal dan institusional lain. Misalnya melalui media massa seperti radio, surat kabar, televisi, dan majalah. Atau bisa juga melalui parpol, partai yang sangat ideologis dengan struktur organisasi yang hirakis seperti partai komunis cenderung mengendalikan kelompok kepentingan ini.

Kelompok kepentingan memusatkan perhatian pada bagaimana mengartikulasikan kepentingan tertentu kepada pemerintah sehingga susunan kebijakan yang dihasilkan pemerintah dapat menampung kepentingan kelompok. Aktivitas kelompok kepentingan menyangkut tujuan-tujuan yang lebih terbatas, dengan sasaran-sasaran yang monolitik, serta dengan intensitas usaha yang tidak berlebihan.⁷ Masyarakat yang tergabung dalam kelompok kepentingan, biasanya akan sangat sensitif terhadap isu politik dalam lingkup ikatan kelompok politik yang sempit. Kelompok ini akan menggunakan tindakan politik sebagai sarana penyelesaian pertentangan dan pencapaian kepentingan.⁸

Selain itu, kelompok kepentingan juga bertugas sebagai penghimpun atau broker kepentingan dan tuntutan masyarakat. Hal ini hanya sebatas menampilkan isu-isu penting dalam masyarakat agar mereka mendapat perhatian dari pembuat

⁷ Cheppy Haricahyono, 1991, *Ilmu Politik dan Perspektifnya*, Yogyakarta: Tiara Wacana, hlm. 201

⁸ Arifin Rahman, 2001, *Sistem Politik Indonesia*, Surabaya: SIC, hlm. 105

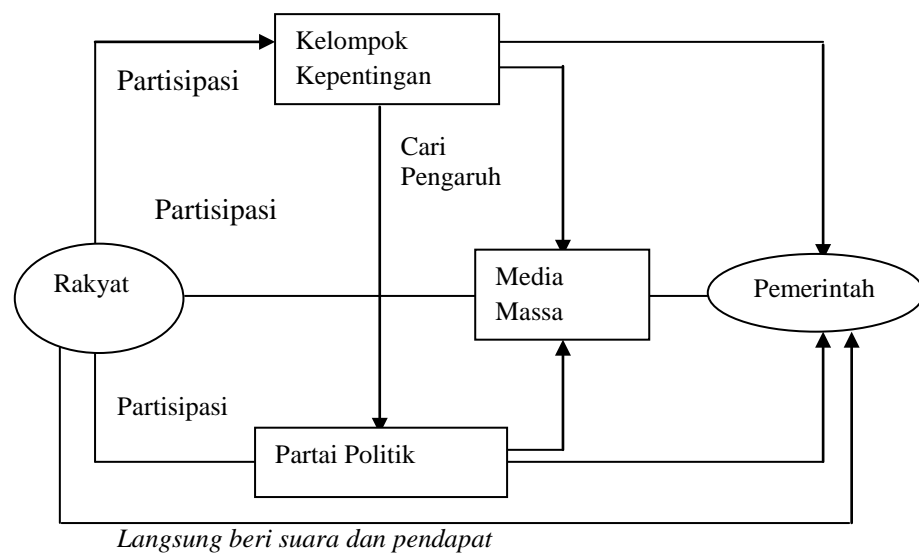
keputusan, tetapi tanpa berniat menduduki satu jabatan dalam jaringan birokrasi.

Upaya menarik perhatian dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:⁹

1. Menawarkan kepentingan masyarakat yang sudah diartikulasikan untuk “dibeli” oleh partai politik.
2. Secara langsung menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah yang sering didahului oleh munculnya polemik dalam masyarakat.

Kelompok kepentingan juga dapat berperan penting dalam fungsinya sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada diagram di bawa

Gambar 1.2
Saluran Penyampaian Pendapat dari Rakyat ke Pemerintah



Sumber: Gambar dari buku *Demokrasi Indonesia Kontemporer* yang ditulis Riza Noer Arfani halaman 164 tahun 1996.

⁹ Riza Noer Arfani, 1996. *Demokrasi Indonesia Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 162-163

Agar aspirasi tersebut masuk ke dalam mesin politik, kelompok kepentingan melakukan tiga cara utama, yaitu *lobbying*, *mass propaganda*, dan *grass-roots pressure*. Di antara ketiganya, lobby dianggap sebagai cara yang paling efektif. Dengan lobby berarti kelompok kepentingan dapat melakukan kontak langsung dengan pengambil keputusan.

Menurut Cummings, lobby adalah *communication with legislator or other government officials to try to influence their decision*. Di sini dapat dilihat bahwa lobby tak hanya dapat mempengaruhi legislator tetapi juga mempengaruhi eksekutif. Ada lima syarat yang harus dipenuhi suatu kelompok untuk dapat melakukan lobby secara efektif, yaitu:¹⁰

1. Sumber Daya Fisik (*Physical Resources*), seperti adanya dana yang menggerakkan organisasi dan anggota yang banyak dan tersebar luas.
2. Sumber Daya Organisasi (*Organizational Resources*), yaitu seperti kecakapan anggota untuk mengelola aspirasi yang mereka integrasikan dan juga rasa kesatuan agar tindakannya sejalan.
3. Sumber Daya Politik (*Political Resources*), yaitu pemahaman kelompok dan anggota akan proses politik yang berlangsung, keahlian mengatur strategi perjuangan politik, dan reputasi kelompok dan anggotanya.
4. Sumber Motivasi (*Motivational Resources*) yaitu melihat pada ideologi yang dipegang oleh kelompok.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 165-166

5. Sumber Daya Tak Terlihat (*Intangible Resources*) seperti adanya orang lain yang tiba-tiba datang dan bergabung maka akan semakin mempermudah pencapaian tujuan.

1.5.3.4. Saluran-saluran Kelompok Kepentingan

Dalam menjalankan perannya, kelompok kepentingan akan selalu berusaha mencari saluran-saluran khusus sebagai upaya menyalurkan tuntutan dan aspirasi mereka. Hal ini akan disertai pengembangan teknik-teknik penyampaian agar tuntutan mereka diperhatikan dan ditanggapi. Saluran-saluran penyampaian aspirasi tersebut dapat berupa:¹¹

1. Demonstrasi dan tindakan kekerasan

Kerusuhan, demonstrasi dan pembunuhan merupakan ciri kelompok kepentingan anomik, tapi tak jarang kelompok kepentingan lain yang menggunakannya. Untuk itu perlu dibedakan antara:

- a. Tindakan kekerasan spontan oleh kelompok kepentingan anomik
- b. Tindak kekerasan dan demonstrasi sebagai sarana menyatukan tuntutan yang bisa dipakai oleh setiap kelompok kepentingan

2. Hubungan pribadi

Sarana yang dapat digunakan antara lain keluarga, sekolah, hubungan-hubungan kedaerahan atau yang lain. Hubungan langsung tatap muka adalah cara yang efektif untuk membentuk sikap seseorang sehingga kemungkinan untuk memperoleh tanggapan baik semakin besar.

3. Perwakilan langsung

¹¹ Mas'ood, *op.cit.*, hlm. 57-59

Melalui hal ini kelompok kepentingan dapat mengkomunikasikan secara langsung dan kontinyu kepentingan-kepentingannya melalui seorang anggota aktif dalam struktur pembuat keputusan.

4. Saluran formal dan institusional lain

a. Media massa

Sarana media massa antara lain radio, surat kabar, televisi, dan majalah. Dalam masyarakat terbuka, media massa adalah penyalur utama tuntutan politik dan sarana mencapai pembuatan keputusan.

b. Partai politik

c. Badan legislatif, kabinet, dan birokrasi

Hubungan dengan birokrasi di berbagai tingkatan dan departemen sangat penting terutama bila wewenang pembuatan keputusan didelegasikan kepada cabang-cabang birokrasi, atau bila kelompok kepentingan lebih berminat untuk mempengaruhi bentuk tindakan tertentu daripada kebijaksanaan yang umum.

1.5.3.5. Efektivitas Kelompok Kepentingan

Walaupun saluran-saluran penyampaian aspirasi bagi kelompok kepentingan sudah sangat jelas, tetapi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan tidak semua kegiatan ataupun aspirasi dapat tersalurkan dengan baik dan dijalankan secara efektif. Hal ini akan bergantung dari banyak faktor baik internal maupun eksternal dari kelompok kepentingan tersebut. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas kelompok kepentingan antara lain:¹²

¹²*Ibid.*, hlm. 60-61

- a. Kemampuan untuk mengerahkan dukungan, tenaga, dan sumberdaya dari anggotanya
- b. Luasnya sumberdaya yang dimilikinya, seperti kemampuan finansial, jumlah anggota, kecakapan politik, kesatuan organisasi dan prestisenya di mata masyarakat umum atau para pembuat keputusan pemerintahan.
- c. Sifat dari issue dan kebijaksanaan pemerintahan pada waktu tertentu.
- d. Otonomi dan kebebasan kelompok kepentingan. Tidak adanya kebebasan bagi kelompok kepentingan untuk menyatakan kepentingan bisa berakibat munculnya ledakan tindakan kekerasan di kalangan masyarakat.

Tiap-tiap kelompok-kelompok kepentingan yang ada di masyarakat pasti mempunyai tujuan yang berbeda-beda antara kelompok satu dengan lainnya. Tujuan ini ditetapkan agar arah berjalannya kelompok ini menjadi lebih jelas sehingga dalam pelaksanaannya menjadi lebih tersistem. Tiap kelompok kepentingan dapat menekankan beberapa tujuan yang diharapkan mampu dijalankannya.

Salah satu hal yang banyak diperjuangkan oleh kelompok kepentingan yang ada di beberapa tempat adalah mengupayakan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan inilah yang nantinya akan menjadi cerminan tercapainya tujuan dari sebuah kelompok kepentingan tersebut. Kesejahteraan sosial ini dapat berwujud fisik maupun non fisik, materi maupun non materi.

Kesejahteraan tak hanya akan berguna bagi individu masyarakat sendiri tetapi juga akan berdampak bagi lingkungan dan negara.

1.5.3.6. Partisipasi Kelompok Kepentingan

Sebagai definisi secara umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintahan (public policy).

Canter (dalam Arimbi, 1993:1) mendefinisikan partisipasi sebagai feed-forward information and feedback information. Dengan definisi ini, partisipasi masyarakat sebagai proses komunikasi dua arah yang terus menerus dapat diartikan bahwa partisipasi masyarakat merupakan komunikasi antara pihak pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan masyarakat di pihak lain sebagai pihak yang merasakan langsung dampak dari kebijakan tersebut. Dari pendapat Canter juga tersirat bahwa masyarakat dapat memberikan respon positif dalam artian mendukung atau memberikan masukan terhadap program atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah, namun dapat juga menolak kebijakan. Sedangkan menurut Nelson, Bryant dan White (1982:206) menyebutkan bahwa keterlibatan kelompok atau masyarakat sebagai suatu kesatuan, dapat disebut partisipasi kolektif, sedangkan keterlibatan individual dalam kegiatan kelompok dapat disebut partisipasi individual. Partisipasi yang dimaksud ialah partisipasi vertikal dan horisontal masyarakat. Disebut partisipasi vertikal karena bisa terjadi dalam kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program

pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada pada posisi sebagai bawahan, pengikut atau klien. Disebut partisipasi horisontal, karena pada suatu saat tidak mustahil masyarakat mempunyai kemampuan untuk berprakarsa, di mana setiap anggota/kelompok masyarakat berpartisipasi horisontal satu dengan yang lain, baik dalam melakukan usaha bersama, maupun dalam rangka melakukan kegiatan dengan pihak lain. Tentu saja partisipasi seperti itu merupakan suatu tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri. Bentuk-bentuk partisipasi yang dilakukan oleh kelompok kepentingan meliputi:

1. **Lobbying:** Aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan mempengaruhi pimpinan organisasi lain maupun orang yang memiliki kedudukan penting dalam organisasi dan pemerintahan sehingga dapat memberikan keuntungan untuk diri sendiri ataupun organisasi dan perusahaan pelobi. Dalam politik, pelobian diartikan sebagai bentuk partisipasi politik yang mencakup usaha individu atau kelompok untuk menghubungi pejabat pemerintah atau pemimpin politik dengan tujuan mempengaruhi keputusan tentang suatu masalah yang dapat menguntungkan sejumlah orang.
2. **Political contacting:** Tindakan individu atau sekelompok orang untuk menjalin suatu hubungan atau kontak secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan agar dapat mendapatkan kesepakatan bersama.
3. **Demonstrasi:** Sebuah gerakan protes yang dilakukan oleh sekelompok orang dihadapan umum. Demonstrasi atau unjuk rasa biasanya dilakukan

untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok.

4. **Petisi:** Surat permohonan resmi yang ditujukan kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan publik. Petisi ini bertujuan untuk memprotes kebijakan yang dibuat oleh pemerintah karena dianggap tidak sesuai dan dapat merugikan kelompok kepentingan.¹³

1.5.2. Kebijakan publik

Kebijakan publik merupakan suatu ilmu multidisipliner karena melibatkan banyak disiplin ilmu seperti ilmu politik, sosial, ekonomi, dan psikologi. Studi kebijakan berkembang pada awal 1970-an terutama melalui tulisan Harold D. Laswell. Definisi dari kebijakan publik yang paling awal dikemukakan oleh Harold Laswell dan Abraham Kaplan dalam Howlett dan Ramesh (1995:2) yang mendefinisikan kebijakan publik/*public policy* sebagai “suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik tertentu (a projected of goals, values, and practices)”.

Kebijakan publik adalah keputusan atau peraturan yang dibuat oleh yang berwenang untuk mengatasi masalah publik, sehingga diharapkan tujuan organisasi dapat dicapai dengan baik. Ciri-ciri utama kebijakan publik adalah suatu peraturan atau ketentuan yang diharapkan dapat mengatasi masalah publik. Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai apa yang dilakukan pemerintah,

¹³Miriam Budiardjo, ed., *Partisipasi dan Partai Politik*, PT. Gramedia, Jakarta, 1981

bagaimana mengerjakannya, mengapa perlu dikerjakan dan perbedaan apa yang dibuat. Dye seperti yang dikutip Winarno berpandangan lebih luas dalam merumuskan pengertian kebijakan, yaitu sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*whatever governments choose to do or not to do*).¹⁴

Menurut Dye (1978) ada beberapa aspek yang perlu dilakukan untuk menganalisis suatu kebijakan, yaitu:

1. Mendiskripsikan kebijakan publik, dengan demikian dapat diketahui apa yang dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah dalam aspek kesejahteraan masyarakat, pertahanan negara, pendidikan, hak-hak sipil, dan perpajakan.
2. Mengkaji alasan-alasan yang mendorong pemerintah meluncurkan kebijakan tertentu.
3. Meneliti akibat kebijakan terhadap masyarakat.¹⁵

1.5.2.1 Siklus Kebijakan Publik

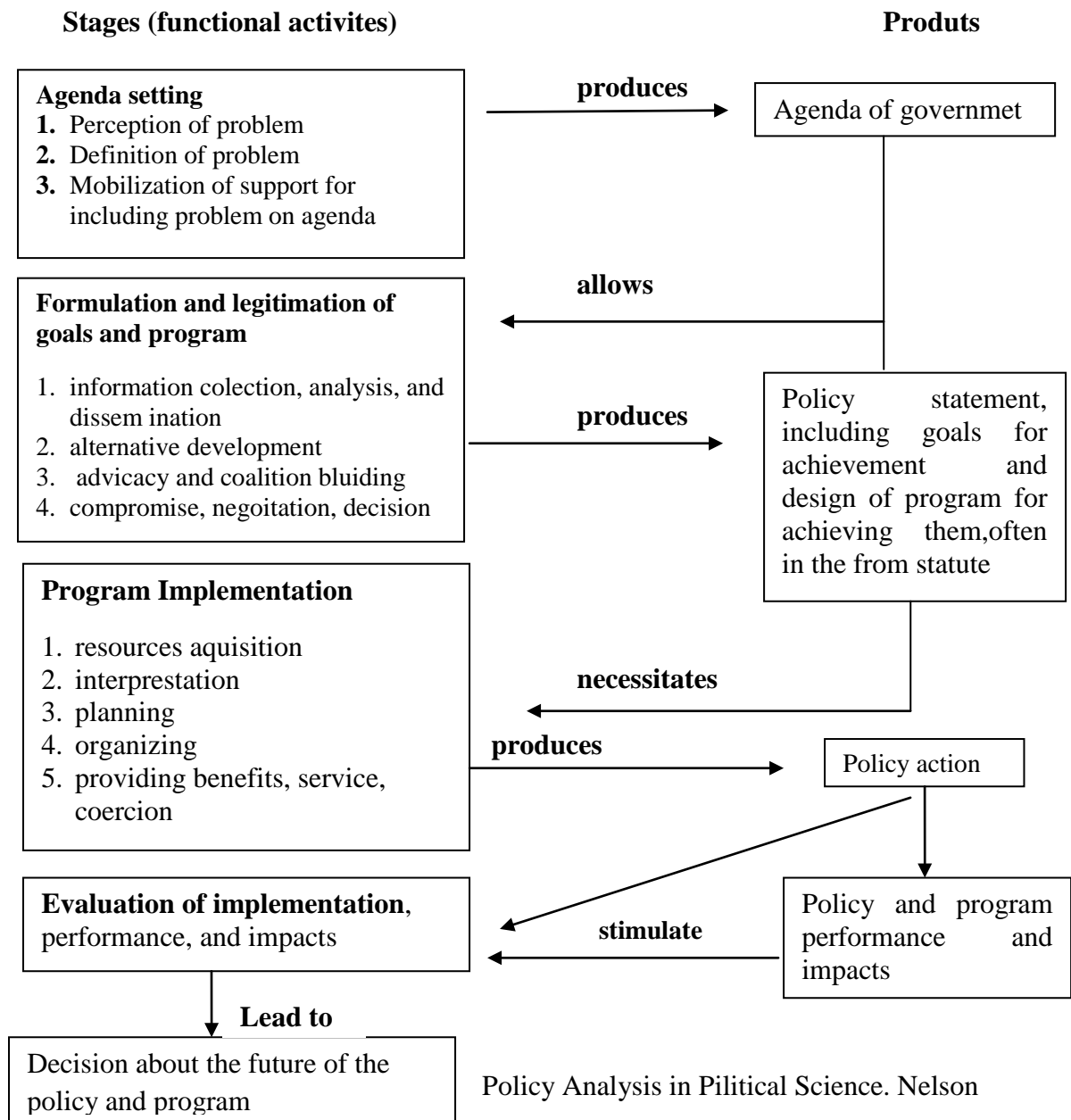
Setiap ataupun subdisiplin mempunyai ruang lingkup kajian sendiri. Kebijakan publik sebagai subdisiplin dari ilmu politik tidak dipahami sebagai kegiatan tunggal, tetapi terdiri dari serangkaian aktivitas yang berbentuk siklus. Siklus inilah yang menjadi ruang lingkup kajian publik. Dalam menyusun suatu kebijakan, urutan perlu dilalui, dari mulai perumusan masalah, dan diakhiri

¹⁴Budi Winarno. (2002). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo

¹⁵Dye, 1978, Ripley, 1985, Winarno, 2002, Lester dan Stewart, 2002.

dengan penghentian kebijakan Lester dan Stewart menyusun tahapan dalam enam langkah dengan uraian masing-masing dipaparkan dalam alinea berikut :¹⁶

Gambar 1.3 Serangkaian aktivitas dalam siklus kebijakan



¹⁶James P. Lester and Joseph Stewart. (2000). *Public Policy: An Evolutionary Approach*. California: Wadsworth Thomson Learning.

Aktivitas dalam proses kebijakan dijelaskan sebagaimana berikut:

1. *Agenda setting*, merupakan suatu tahap dimana diputuskan masalah yang menjadi perhatian pemerintah untuk dibuat menjadi kebijakan. Aktivitas fungsional dalam *agenda setting* adalah:
 - Bagaimana problem yang ada dirasakan keberdayaan oleh individu dan kelompok, memutuskan bahwa pemerintah harus disertakan dalam problem tersebut,
 - Problem didefinisikan,
 - Memobilisasi dukungan untuk memasukkan problem itu menjadi agenda pemerintah, banyak kelompok atau individu melakukan tindakan untuk menarik perhatian aktor-aktor pemerintah agar terlibat dalam masalah tertentu dalam masalah yang ada dalam agenda.
2. Formulasi dan legitimasi tujuan dan program. Tidak seluruh masalah yang ada dalam daftar agenda akan diwujudkan dalam kebijakan program. Formulasi dan legitimasi merupakan aktivitas yang kompleks yang terdiri dari 4 rancangan aktivitas fungsional, adalah mengkoleksi, menganalisis, dan menyebarkan informasi dengan tujuan menilai alternatif-alternatif itu dan memproyeksikan hasilnya.
3. Implementasi program. Setelah formulasi dan legitimasi dapat dipenuhi maka program harus dilaksanakan. Agar program dapat berjalan, maka dibutuhkan berbagai sumber (resources). Menurut Ripley (1985), berbagai aktivitas ini bersifat politis.

4. Evaluasi implementasi: kinerja dan dampak. Setelah aksi kebijakan menimbulkan berbagai akibat, evaluasi terhadap kinerja (proses) maupun dampak perlu untuk dilakukan. Yang dievaluasi adalah:
 - Akibat-akibat dari pelaksanaan program yang baru berjalan/masih berjalan, berarti kinerja/proses yang dievaluasi.
 - Akibat dari pelaksanaan program yang sudah lama/ sudah selesai (*long-run impact*).
5. Keputusan mengenai masa depan program dan kebijakan. Ini dapat mendorong dipertimbangkannya masa depan dari program/kebijakan tersebut.

Munculnya permasalahan publik adalah titik awal dari perlunya keputusan pemerintah untuk membuat kebijakan. Masalah itu sendiri timbul karena adanya faktor ketidakseimbangan antara kebutuhan dan tersedianya sarana. Misalnya para ekonom sering mengatakan adanya ketidakseimbangan antara *supply* dan *demand* karena faktor kelangkaan sumber daya dan persoalan sumber daya yang langka.

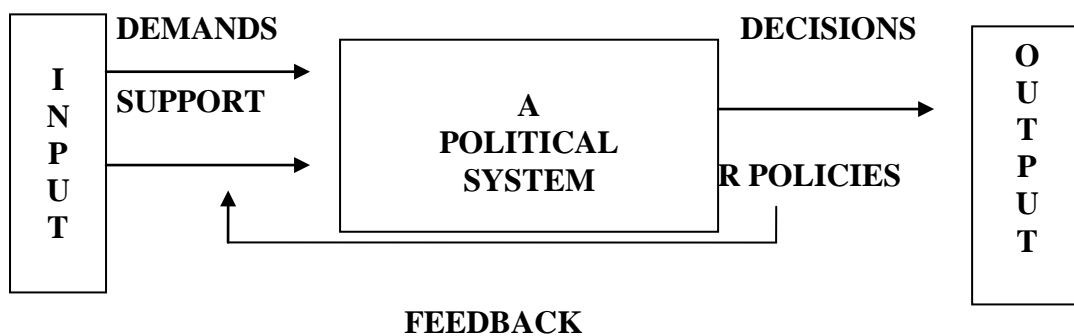
1.5.2.2 Proses Pembuatan Kebijakan Publik

Dilihat dari proses kebijakan, Nugroho menyebutkan bahwa teori proses kebijakan paling klasik dikemukakan oleh David Easton. David Easton dalam Nugroho (2008: 383) menjelaskan bahwa proses kebijakan dapat dianalogikan dengan sistem biologi.

Pada dasarnya sistem biologi merupakan proses interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya, yang akhirnya menciptakan kelangsungan perubahan hidup yang relatif stabil. Dalam terminologi ini Easton menganalogikannya

dengan kehidupan sistem politik. Kebijakan publik dengan model sistem mengandaikan bahwa kebijakan merupakan hasil atau *output* dari sistem (politik). Seperti dipelajari dalam ilmu politik, sistem politik terdiri dari input, throughput, dan output, seperti digambaran sebagai berikut.

Gambar 1.4 Proses Kebijakan Publik Menurut Easton



Sumber: David Easton dalam Nugroho (2008:383)

Pada tahap penyusunan agenda, pembuat kebijakan akan mengumpulkan masalah-masalah publik. Dari masalah-masalah yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisa dan diikuti dengan penyusunan pembuatan kebijakan. Siklus berikutnya ialah menerapkan kebijakan tersebut dalam masyarakat, dan diikuti dengan mengevaluasi. Dengan menganalisis hasil evaluasi, maka dibuatlah penyesuaian atau perubahan bagi peyempurnaan *policy*. Langkah terakhir dari siklus pembuatan kebijakan ialah mengakhiri kebijakan karna tujuan sudah tercapai.

1.5.2.3 Aktor-Aktor perumusan Kebijakan

Kajian terhadap para aktor dalam formulasi kebijakan sangatlah penting. Baik dalam negara maju maupun sedang berkembang, para aktor merupakan penentu isi kebijakan dan pemberi warna dinamika tahap-tahap proses kebijakan. Bahkan para ilmuwan politik memberikan penekanan khusus pada aktor-aktor ketika menganalisis proses kebijakan, termasuk para *lesswellian* yang menekankan pada *who gets what* (Grumm dalam Greenstein dan polsby, 1975)

Sesuai pendapat Lester dan Stewart 2000), para aktor perumus kebijakan terdiri dari:

- Agensi pemerintah, Agen-agen pemerintah yang terdiri dari para birokrat karier seringkali memainkan peran penting dalam perumusan kebijakan. Mereka adalah aktor yang mengembangkan sebagian besar usulan kebijakan (inisiator kebijakan).
- Kantor Kepresidenan. Presiden dan atau aparat eksekutif sering terlibat dalam perumusan kebijakan. Adakalanya presiden secara personal terlibat dalam perumusan kebijakan. Selama hampir empat dekade pemerintah otoriter di Indonesia peran lembaga kepresidenan sangat kuat dalam seluruh aktivitas formulasi kebijakan, sedangkan peran DPR sangat lemah sehingga hanya dianggap sebagai “tukang stempel” kebijakan.
- Kongres (Lembaga Legislatif). Sesuai namanya, badan legislatif merupakan institusi yang secara luas dikenal sebagai perumus kebijakan publik. Lembaga ini berperan dalam melegitimasi kebijakan baru maupun merevisi kebijakan yang dianggap keliru.

- Kelompok Kepentingan. Pada umumnya di beberapa negara demokrasi, kelompok kepentingan merupakan aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan spesifik. Namun pada negara lainnya boleh jadi peran kelompok kepentingan tidak signifikan dalam perumusan kebijakan, misalnya di Indonesia.¹⁷

1. 6 Operasionalisasi Konsep

Upaya Asosiasi Petani Tembakau Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan petani tembakau di Kabupaten Temanggung dapat dilihat dari Operasionalisasi Konsep sebagai berikut ;

- 1) Kelompok kepentingan adalah sekelompok orang yang berkumpul ke dalam suatu wadah di mana kelompok tersebut terbentuk karena adanya kesamaan kepentingan di antara satu anggota dengan yang lainnya dan biasanya mereka tidak berkumpul untuk memperoleh jabatan publik.
- 2) Peran Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Temanggung dalam memperjuangkan kepentingan petani tembakau di Kabupaten Temanggung adalah keterlibatan dan usaha-usaha Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Temanggung dalam rangka meningkatkan kemakmuran masyarakat petani tembakau Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan konsep-konsep tersebut penelitian ini menggunakan beberapa indikator untuk mempermudah dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini:

¹⁷Kusumanegara Solahudin, 2010, *Model Dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gava Media, hlm 88-89.

1. Bentuk dan Cara APTI dalam merespon RUU Pertembakauan, meliputi :
 - a. Bentuk perjuangan APTI dalam upaya memperjuangkan petani tembakau Kab. Temanggung
 - b. Cara APTI melakukan komunikasi dan representasi dengan orang yang berkepentingan dan melalui saluran formal dan instisuional misalnya melalui media masa maupun media online.
2. *Efektivitas* upaya APTI yang berdampak bagi petani:
 - a. Kesesuaian antara aspirasi kelompok APTI dan isi RUU Pertembakauan yang memihak kepada petani tembakau.
3. Faktor Pendukung dan Penghambat perjuangan APTI dalam memperjuangkan kepentingan petani tembakau
 - a. Faktor pendukung yang membantu perjuangan APTI
 - b. Faktor penghambat yang menghambat perjuangan APTI

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Desain Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian kualitatif-deskriptif karena penelitian ini diarahkan untuk melukiskan dan menjelaskan gejala, fakta atau kejadian secara sistematis dan akurat suatu situasi, masalah, fenomena, pelayanan atau program, penyediaan informasi mengenai suatu situasi, kehidupan masyarakat atau menggambarkan sikap masyarakat menanggapi suatu isu tertentu.¹⁸ Tujuan penelitian dengan

¹⁸Ahmad Taufiq. 2006 Modul *Dasar-Dasar Penelitian*. Semarang : FISIP UNDIP. Halaman 1-11

metode kualitatif adalah untuk mengeksplor fenomena-fenomena di masyarakat yang tidak dapat dikuantifikasikan. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasar teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan dan diperoleh dari situasi alamiah, Penelitian kualitatif memfokuskan pada analisis dan pemahaman data sehingga mengutamakan kualitas analisis daripada data yang bersifat statistik.

1.7.2 Jenis dan Sumber Data

a. Data primer

Adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan peneliti secara langsung dari sumbernya. Data tersebut dapat diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus grup diskusi, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan nara sumber.

b. Data sekunder

Adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan peneliti secara tidak langsung dari obyek-obyek penelitian, meliputi kajian pustaka, laporan, literatur yangn berkaitan dengan penelitian.¹⁹

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

¹⁹Dalam Lexy Moleongn, “ Metodologi Penelitian Kualitatif”, Hal.246

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap nara sumber atau sumber data. Wawancara digunakan untuk dapat lebih mudah memahami makna secara lebih dalam hasil observasi yang telah dilakukan. Melalui wawancara akan lebih banyak informasi yang diperoleh untuk menjawab permasalahan peneliti yang telah diajukan

b. Obsevasi

Observasi adalah studi yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis tentang fenomena acara sosial serta berbagai fenomena psikis melalui pengamatan dan pencatatan.

c. Telaah Dokumen

Telaah dokumen yaitu mengkaji dokumen-dokumen baik berupa buku referensi maupun peraturan atau pasal yang berhubungan dengan penelitian ini guna melengkapi materi-materi yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan.

1.7.4 Analisis Data

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam proses analisis data adalah:

a) Reduksi data

Adalah proses penyederhanaan data yang tadinya banyak dan luas. Banyaknya data yang terkumpul kemudian dipilih antara yang pennting dan tidak dan antara yang relevan dan yang tidak relevan.

b) Pengorganisasian data

Adalah penyusunan data secara sistematis, menyatukan dan menyusun data berserakan tersebut kedalam sebuah data yang sistematis.

c) Interpretasi data

Tujuan dilakukannya interpretasi data adalah untuk mengadakan pendeskripsian data dalam proses analisis. Interpretasi data digunakan untuk menerangkan hubungan-hubungan yang terjadi dari suatu data terorganisir berdasar sistematika yang berurutan.